

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS PERTANAHAN DAN
PENATAAN RUANG TAHUN 2022**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAIKARTANEGARA
DINAS PERTANAHAN DANPENATAAN RUANG
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2021 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2022, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang disusun pada akhir periode anggaran pelaksanaan program/kegiatan memiliki dua fungsi yaitu merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja utama organisasi yang telah ditetapkan, serta sebagai sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2021 – 2026 dijadikan landasan dalam penyusunan dokumen LKjIP Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2022 untuk mengukur pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Akhir kata, kami berharap dengan adanya laporan ini dapat memperoleh umpan balik yang bermanfaat guna mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggung jawaban kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang kepada pemberi mandat dan sarana perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Kutai Kartanegara, Februari 2023

KEPALA DINAS PERTANAHAN DAN
PENATAAN RUANG,



SETIANTO NUGROHO AIL SH. M. Si

Pembina Utama Muda (IV/c)NIP.

19671027 199403 1 008

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Tupoksi	2
1.4 Permasalahan dan Isu Strategis	3
1.5 Uraian Singkat Organisasi	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
2.1 Perencanaan Strategis	10
2.2 Tujuan dan Sasaran	12
2.3 Rencana Kinerja Tahunan	15
2.4 Perjanjian Kinerja	21
2.5 Alokasi Anggaran Per Program	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	30
3.1 Capaian Kinerja	30
3.2 Realisasi Kinerja Tahun 2021	31
3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2022	48
BAB IV PENUTUP	61
4.1 Kesimpulan	61
4.2 Perbaikan Kedepan	61
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP PMR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalisme, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan sesuatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- 1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033;
- 7) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026;
- 8) Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2011, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 21);
- 9) Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;
- 10) Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026;

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

1.3.1 Tugas

Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang , mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang.

1.3.2 Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati No 21 Tahun 2021 tersebut, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang;
2. Pelaksana kebijakan di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

1.4 Permasalahan dan Isu Strategis

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara, tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, selain bahwa menggabungkan dua fungsi yang berbeda menjadi satu tupoksi yang selaras memerlukan penyesuaian ada beberapa permasalahan lain yang dihadapi antara lain :

1. pemanfaatan lahan tidak optimal
2. Banyak lahan- lahan investasi melalui hak guna usaha tidak dimanfaatkan dengan optimal sehingga menjadi lahan tidur yang tidak dimanfaatkan masyarakat;
3. Belum terpenuhinya kebutuhan data dan informasi pembangunan yang akurat dan mutakhir untuk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi;
4. Lahan HPL Transmigrasi yang tidak dapat dioptimalkan untuk lahan pembangunan;
5. Data-data dan informasi pertanahan yang belum terakomodir dengan baik;
6. Perlunya penertiban kepemilikan tanah oleh Pemerintah;
7. Perlunya penanganan permasalahan pertanahan terhadap tanah Negara atau tanah bekas hak;
8. Terbatasnya sarana dan prasarana aparatur dalam melaksanakan pelayanan public secara berkualitas;
9. Rendahnya kualitas sumber daya manusia, dalam hal ini kemampuan Aparatur Sipil Negara untuk melakukan pelayanan secara berkualitas.

1.5 Uraian Singkat Organisasi

Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai kartanegara dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang , mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang.

Adapun susunan organisasi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahkan :
 - Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan
 - Pejabat Fungsional
 - Pejabat Fungsional.
3. Bidang Tata Ruang, membawahkan :
 - Pejabat Fungsional
 - Pejabat Fungsional
 - Pejabat Fungsional
4. Bidang Pengadaan dan Penataan Administrasi Pertanahan, membawahkan :
 - Pejabat Fungsional
 - Pejabat Fungsional
 - Pejabat Fungsional
5. Bidang Penatagunaan dan Penguatan Hak Atas Tanah, membawahkan :
 - Pejabat Fungsional
 - Pejabat Fungsional
 - Pejabat Fungsional
6. Bidang Sengketa Tanah, membawahkan :
 - Pejabat Fungsional
 - Pejabat Fungsional
 - Pejabat Fungsional
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang sesuai dengan keahlian dan ketentuan yang berlaku.

Gambar 1.3 Struktur Organisasi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 21 TAHUN 2021 TANGGAL 27 SEPTEMBER 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG



Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Badan Hukum

P. H. M. S. H. M. H.
Nip. 19780505 20021 002

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

1.6 Sumber Daya Dinas Pertanian dan Penataan RuangKab.Kutai Kartanegara

1. Kondisi Umum Pegawai

Guna menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pertanian dan Penataan Ruang Kab.Kutai Kartanegara di dukung oleh sumber daya manusia yang memadai. Untuk dapat menghasilkan perencanaan yang baik dan berkualitas, dibutuhkan aparatur dengan disiplin ilmu yang berbeda. Berikut adalah jumlah Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Pertanian dan Penataan Ruang.

Tabel 1.1 : Jumlah Pegawai Dinas Pertanian dan Penataan Ruang Kab.Kukar Tahun 2022

No	Pegawai	Jumlah	Persentase (%)
		(orang)	
1.	Aparatur Sipil Negara	66	58,65
2.	Tenaga Harian Lepas (THL)	52	41,36
	Jumlah	118	100

Sumber : Sub.Kepegawaian Dinas Pertanian dan Penataan Ruang Tahun 2022

a. Jumlah pegawai yang menduduki jabatan

Sesuai dengan Perbub Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Pertanian Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara, maka pengisian formasi Jabatan Struktural terdiri dari Esselon II,III, dan IV yaitu sebanyak 7 orang dan Fejabat Fungsional hasil Penyetaraan sebanyak 12 orang, Selengkapnya dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 1.2 : Jumlah Pegawai Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab.Kukar berdasarkan jabatan Tahun 2022

Jabatan		Formasi Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
			Laki-laki	Perempuan	
A	Pejabat Struktural				
	Eselon II/b	Kepala Dinas	1	-	1
	Eselon III/a	Sekretaris Dinas	1	-	1
	Eselon III/b	Kepala Bidang	3	1	4
	Eselon IV/a	Kepala Sub. Bagian	1	-	1
B	Jabatan Fungsional Tertentu				
	Analsi Sumber Daya Manusia Aparatur	-	-	1	1
	Perencana	-	-	1	1
	Penata Kadasteral	-	2	3	5
	Penata Ruang	-	3	-	3
	Penyuluh Pertanahan	-	2	-	2
C	Fungsional Umum				
	Pelaksana	-	22	25	47
Total Jumlah Pegawai / ASN			35	31	66

Sumber : Sub.Kepegawaian Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2022

b.Jumlah pegawai berdasarkan Golongan / pangkat

Dari jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 66 orang yang ada di Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab.Kutai Kartanegara, terdapat 39,75% yang berstatus golongan II, 52,58 % golongan III, dan 7,71% golongan IV.

Tabel 2.3 : Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan / Pangkat Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2022

Pangkat / Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Pembina Utama Muda (IV/c)	1	0	1
Pembina Tk 1 (IV/b)	2	0	2
Pembina (IV/a)	3	1	4
Penata Tk. I (III/d)	9	10	19
Penata (III/c)	1	4	5

Pangkat / Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Penata Muda Tk.I (III/b)	3	4	7
Penata Muda (III/a)	0	3	3
Pengatur Tk. I (II/d)	10	8	18
Pengatur (II/c)	4	1	5
Pengatur Muda Tk. I (II/b)	2	0	2
Pengatur Muda (II/a)	0	0	0
Total Jumlah Pegawai / ASN	35	31	66

Sumber : Sub.Kepegawaian Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2022

a. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan

Apabila dilihat dari tingkat Pendidikan pegawai Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang yang ada, maka status pendidikan dengan Strata – I lebih mendominasi Selengkapnya dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 2.4 : Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2021

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
S3	0	0	0
S2	7	3	10
S1	10	15	25
Diploma IV	0	0	0
Diploma III	0	1	1
Diploma II	0	0	0
Diploma I	0	0	0
SLTA	18	12	30
SLTP	0	0	0
SD	0	0	0
Total Jumlah Pegawai / ASN	35	31	66

Sumber : Sub.Kepegawaian Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2022

Sedangkan untuk formasi Tenaga Harian Lepas (THL) yang dimiliki Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang sebanyak 51 Orang ,Selengkapnya dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 2.5 : Jumlah Pegawai Tenaga Harian Lepas (THL) berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2022

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
S3	-	-	-
S2	-	-	-

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
S1	17	10	27
Diploma IV	-	-	-
Diploma III	1	0	1
Diploma II	0	0	0
Diploma I	-	-	-
SLTA	17	6	23
SLTP	0	1	1
SD	-	-	-
Total Jumlah THL	35	16	51

Sumber : Sub.Kepegawaian Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2022

2. Kondisi Umum Sarana dan Prasarana Kerja

Sarana dan Prasarana merupakan salah satu penunjang utama dalam upaya meningkatkan kinerja sebuah organisasi. Sarana dan Prasarana ini digunakan antara lain :

- Menunjang kegiatan ketatausahaan/administrasi perkantoran;
- Menunjang peningkatan kualitas SDM Aparat;
- Menunjang kegiatan Rapat/ Konsultasi/ Fasilitasi/ Sosialisasi.

Berikut adalah jenis dan jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara :

Tabel 2.6 : Sarana dan Prasarana Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara (Data Aset Tanah)

No	Uraian	Luas (M²)	Lokasi
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.558	Jl.Muso Bin Salim No.06 Kel.Melayu

Sumber : Kartu Inventaris Barang (KIB A)

Adapun data perolehan aset peralatan dan mesin lainnya, dapat di rincikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.8 : Sarana dan Prasarana Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara (Data Aset Peralatan dan Mesin)

No	Uraian	Satuan	Jumlah
A	Alat-alat Angkutan 102		
1.	Kendaraan Bermotor Roda Dua	Unit	4
2.	Staion Wagon	Unit	2
3.	Mini Bus	Unit	1
B	Alat Kantor dan Rumah Tangga		
4.	Meja Tambahan	Unit	2

No	Uraian	Satuan	Jumlah
5.	Kursi Rapat	Unit	2
6.	Sofa	Unit	4
7.	Meja Kerja Pejabat Ess II	Unit	2
8.	Meja Kerja Pejabat Ess III	Unit	3
9.	Meja Kerja Pejabat Lain-Lain	Unit	4
10.	Kursi Kerja pejabat Ess IV	Unit	9
11.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Unit	45
12.	Meja Biro	Unit	65
13.	Lemari Kayu	Unit	6
14.	Lemari Besi	Unit	11
15.	Lemari Arsip	Unit	7
16.	Filling Besi/Metal	Unit	48
17.	Band Kas	Unit	1
18.	Mesin Penghancur Kertas	Unit	2
19.	Papan Nama Instansi	Unit	2
20.	Moubiler Laiinya	Unit	3
21.	Note Book	Unit	22
22.	Peralatan Personal Komputer	Unit	1
23.	Personal Komputer	Unit	38
24.	Mesin Ketik Manual Standar	Unit	6
25.	Mesin Ketik Elektronik	Unit	1
26.	Mesin Ketik Manual Longewagen (18)	Unit	1
27.	Hard Disk	Unit	12
28.	Printer	Unit	46
29.	Scanner	Unit	9
30.	Slide Projector	Unit	6
C	Alat Bengkel dan Alat Ukur		
31.	Global Positioning System	Unit	17
32.	Alat Ukur Metaran	Unit	20
33.	Alat Khusus Surta (Survey dan Pemetaan)	Unit	4
34.	Monitor	Unit	1
35.	Tustel	Unit	7
36.	HandyCam	Unit	2
37.	Video Camera dan Recorder	Unit	5
38.	Ploter	Unit	2
39.	Camera Electronik	Unit	4
40.	CCTV	Unit	3
41.	Theodolt	Unit	1
42.	Kompas	Unit	5
43.	Air Conditioning Unit	Unit	7
44.	AC Split	Unit	6
45.	Tangga Aluminium	Unit	1
46.	Alat Rumah Tangga Lainnya	Unit	1
47.	Dispenser	Unit	2
48.	Televisi	Unit	3
49.	Lemari Pendingin	Unit	1
50.	Gorden	Pasang	2
51.	Karpel	Roll	1
52.	Tabung Pemadam Kebakaran	Unit	4
53.	Bola Api	Unit	6
54.	Wireless Amplifier	Unit	1

Sumber : Kartu Inventaris Barang (KIB B)

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

2.1.1 Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Penjabaran daripada Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih, yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021–2026 dan diturunkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021–2026. Adapun Visi Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan RPJMD 2021–2026.

Visi Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 yaitu “Mewujudkan Kutai Kartanegara yang Sejahtera, dan Berbahagia”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut:

Penjabaran dari visi tersebut sebagai berikut :

- Masyarakat yang sejahtera, Batasan pengertian sejahtera, kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang mudah mengakses hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan sumber daya ekonomi secara adil dan berkesinambungan. Diharapkan dari kemudahan mendapatkan kebutuhan dasar masyarakat dan perekonomian, masyarakat semakin sejahtera.
- Masyarakat yang berbahagia, Kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang

harmoni, hidup dengan penuh ketenteraman Diselimuti rasa kebersamaan, kepedulian, dan gotong-royong berlandaskan iman dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Diharapkan dari menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat membuat warga Kabupaten Kutai Kartanegara semakin berbahagia.

Selain visi dan Misi, pasangan Edi Damansyah dan Rendi Solihin Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara merumuskan filosofi pembangunan Kukar tahun 2021-2024 yaitu Kukar Idaman. Idaman secara etimologi berarti sesuatu yang diharapkan, yang didambakan, yang dicita-citakan. Sedangkan untuk akronim berarti inovatif, daya saing dan mandiri (Idaman). Kukar Idaman ialah satu gerakan yang mengoptimalkan seluruh potensi daerah, dengan mendorong kreatifitas dan inovasi seluruh pelaku pembangunan dan menciptakan daya saing kemandirian yang didasari semangat kolaborasi dan sinegisitas antara pemerintah kabupaten, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat untuk mewujudkan Kukar lebih baik ke depan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun misi yang ditetapkan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 yang tertuang dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara adalah :

1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani;
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia , Unggul dan Berbudaya;
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian , Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah;
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan.

2.2 Tujuan Dan Sasaran

Ditinjau dari sisi tugas perencanaan, secara umum tugas Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun secara khusus, tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian beberapa misi pembangunan, diantaranya :

1. Pencapaian Misi I : Memantapkan Birokrasi Yang Bersih , Efektif , Efisien dan Melayani Dalam pelaksanaan misi ini , Tujuan dan Sasaran yang dituju adalah :

Tujuan : Terwujudnya tertib administrasi pertanahan

Sasaran : Meningkatnya penataan, penguasaan dan pemanfaatan pertanahan

2. Pencapaian Misi IV : Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah Dalam pencapaian misi ini Tujuan dan Sasaran yang dituju adalah sebagai berikut:

Tujuan : Terwujudnya tata ruang wilayah kabupaten yang produktif dan berkelanjutan

Sasaran : Pembangunan dan Pemanfaatan sesuai Arahana Pola Ruang

**Tabel 2.1. Cascading Visi-Misi Kabupaten dengan Perencanaan Strategis Dinas
Pertanahan Dan Penataan Ruang**

Visi : Mewujudkan Kutai Kartanegara yang Sejahtera, dan Berbahagia			
Misi I : Memantapkan Birokrasi Yang Bersih , Efektif , Efisien dan Melayani			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya tertib administrasi pertanahan	Meningkatnya penataan, penguasaan dan pemanfaatan pertanahan	Peningkatan Penataan dan Pemanfaatan Pertanahan di Kabupaten Kutai Kartanegara	- Peningkatan pelayanan, penataan pemanfaatan tanah serta pengendalian administrasi pertanahan - Meningkatkan penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan tanah untuk Pembangunan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - Meningkatkan Penetapan Subjek dan Objek distribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota - Meningkatkan Penetapan Tanah Ulayat yang lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota Meningkatkan Penyelesaian Sengketa Tanah - Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Meningkatkan Kualitas pelaporan yang tepat waktu, pelayanan administrasi umum dan mengoptimalkan penggunaan dan anggaran di Sekretariat	- Penyusunan Dokumen Perencanaan, - Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat - Penyelenggaraan Administrasi Keuangan - Penyelenggaraan Administrasi Barang dan - pelaporan BMD tepat

Visi : Mewujudkan Kutai Kartanegara yang Sejahtera, dan Berbahagia			
			waktu - Pendidikan dan Pelatihan Formal/Informal - serta Peningkatan Disiplin ASN Perangkat Daerah -) Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum - Perangkat Daerah - 6) Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur dan - Pemutakhiran Peralatan Kantor.
MISI II : Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya tata ruang wilayah kabupaten yang produktif dan berkelanjutan	Pembangunan dan Pemanfaatan sesuai Arahan Pola Ruang	Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Melalui Informasi Tata Ruang	- Meningkatkan jumlah produk tata ruang menjadi produk hukum - Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan tata ruang - menetapkan insentif dan disinsentif pemanfaatan ruang - meningkatkan penertiban pelanggaran tata ruang

Pada tahun 2022 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut.

Tabel 2.2
Cascading Program berdasarkan Indikator Kinerja Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
Meningkatnya penataan , penguasaan dan pemanfaatan pertanahan	- Nilai SAKIP Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	- Program Penunjangan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
Meningkatnya penataan , penguasaan dan pemanfaatan pertanahan	- Persentase Penanganan Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota - Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	- Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan; - Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee; - Program Penatagunaan Tanah - Program Pengelolaan Izin Lokasi - Program Penetapan Tanah Ulayat - Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
	- Persentase tersedianya tanah objek landreform yang siap di redistribusikan ke Masyarakat - Persentase tersedianya tanah untuk masyarakat - Persentase Tanah Aset Pemerintah Yang Bersertifikat	Pembangunan - Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah - Program Pengelolaan Izin Lokasi
3. Pembangunan & Pemanfaatan sesuai Arahan Pola Ruang	- Persentase ketaatan terhadap RTRW	- Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara melalui berbagai program dan kegiatan tahunan. Adapun Program Kegiatan dan sub kegiatan yang telah sesuai dengan nomenklatur baru sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 090 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Rencana Kinerja Tahun 2022

Nama Program	Nama Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Kinerja 2022	
					Lokasi	Target Kinerja
PROGRAM PENYELENGGARAN PENATAAN RUANG	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah RTRW Yang ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah	Perda	Kab. Kutai Kartanegara	1
PROGRAM PENYELENGGARAN PENATAAN RUANG		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah RDTR Yang ditetapkan Menjadi Peraturan Bupati	Perbup	Kab. Kutai Kartanegara	2
PROGRAM PENYELENGGARAN PENATAAN RUANG	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Materi Teknis	Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	1

Nama Program	Nama Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Kinerja 2022	
					Lokasi	Target Kinerja
PROGRAM PENYELENGGARAN PENATAAN RUANG	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1) Jumlah pertimbangan teknis pemanfaatan ruang yang diterbitkan, 2) Dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang , 3) Jumlah kelurahan/desa yang melakukan konsultasi/supervisi	1) Berkas , 2) Dokumen, 3) Kelurahan / Desa	Kab. Kutai Kartanegara	1) 100 2) 0 3) 0
PROGRAM PENYELENGGARAN PENATAAN RUANG		Sistem Informasi Penataan Ruang	Persentase data dan informasi terkini	Persen	Kab. Kutai Kartanegara	20
PROGRAM PENYELENGGARAN PENATAAN RUANG	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	1) Jumlah Materi Teknis 2) Jumlah peraturan bupati tentang mengenai insentif dan disinsentif	1) Dokumen, 2) Perbup	Kab. Kutai Kartanegara	1) 1 2) 0
PROGRAM PENYELENGGARAN PENATAAN RUANG		Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1) Jumlah pelanggaran yang teridentifikasi 2) Jumlah sistem/aplikasi terkait pengendalian pelanggaran pemanfaatan ruang	1) Berkas, 2) Aplikasi,	Kab. Kutai Kartanegara	1) 50 2) 1
PROGRAM PENYELENGGARAN PENATAAN RUANG		Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah pelanggaran yang ditertibkan	Berkas	Kab. Kutai Kartanegara	20
PROGRAM PENYELENGGARAN PENATAAN RUANG		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah rapat koordinasi	Kegiatan	Kab. Kutai Kartanegara	20
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun	Jumlah dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	10
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi	Jumlah dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	5

Nama Program	Nama Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Kinerja 2022	
					Lokasi	Target Kinerja
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Laporan	Kab. Kutai Kartanegara	76
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan	Kab. Kutai Kartanegara	2
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan	Kab. Kutai Kartanegara	1
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Data administrasi kepegawaian	Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	5
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen insatalasi listrik	Jumlah Komponen	Kab. Kutai Kartanegara	1
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	Jenis	Kab. Kutai Kartanegara	45
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah porsi makanan dan minuman yang disediakan	1). Jenis 2). Kotak, 3). Porsi	Kab. Kutai Kartanegara	1). 7 2). 1200 3). 1000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penggandaan	1) jenis 2) Lembar	Kab. Kutai Kartanegara	1) 4 2) 36000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	Kali	Kab. Kutai Kartanegara	15

Nama Program	Nama Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Kinerja 2022	
					Lokasi	Target Kinerja
/KOTA						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen	Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	1
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rekening	Kab. Kutai Kartanegara	5
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1) Jumlah bulan penyediaan tenaga pendukung non PNS, 2) Tersedianya Tenaga Kebersihan Kantor	1) Orang, 2) Orang	Kab. Kutai Kartanegara	1) 51 2) 8
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pajak kendaraan dinas	Unit	Kab. Kutai Kartanegara	6
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaran dinas yang dipelihara	Unit	Kab. Kutai Kartanegara	6
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dilakukan Rehab	Gedung	Kab. Kutai Kartanegara	1
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	1

Nama Program	Nama Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Kinerja 2022	
					Lokasi	Target Kinerja
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Inventarisasi sengketa, konflik dan perkara pertanahan dalam satu daerah/kota	Tersedianya informasi rencana lahan pembangunan yg tdk bersengketa dan jumlah laporan hasil inventarisasi sengketa, konflik dan perkara pertanahan dalam satu daerah/kota	Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	2
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah laporan hasil Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	20
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Daftar Masyarakat yang ditetapkan Penerima ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	1
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Jumlah laporan hasil Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	1
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE		Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil koordinasi penyelenggaraan Redistribusi Tanah obyek Reforma Agraria dalam satu daerah Kabupaten/kota	Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	1
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE		Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	1

Nama Program	Nama Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Kinerja 2022	
					Lokasi	Target Kinerja
PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Penetapan Tanah Ulayat yang lokasinya dalam Daerah Kabuapten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat	Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	1
PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi penyelesaian tanah kosong	Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	1
PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan hasil kegiatan inventariasasi tanah kosong	Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	0
PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG		Pemanfaatan Tanah Kosong	1) Jumlah Dokumen, 2) Jumlah Tanah Aset Pemda yang difasilitasi untuk di Sertifikat (Peruntukan Penggunaan)	1) Dokumen 2) Lokasi	Kab. Kutai Kartanegara	1) 1 Dokumen 2) 100 Lokasi
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pemberian Izin Membuka Tanah dan/atau SKPT	Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	1
PROGRAM PENATAGUN AAN TANAH	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah laporan hasil kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	1

2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu

berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2022 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 5. PK & Target Sasaran Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022

SASARAN	INDIKATOR UTAMA	SATUAN	TARGET	Keterangan dan Rumus Hitungan
Meningkatnya Pembangunan Dan Pemanfaatan Sesuai Arah Pola Ruang	1. Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	Persen	65	Persentase ketaatan terhadap RTRW = (luas kesesuaian pemanfaatan ruang/luas wilayah kukar) x 100%
Meningkatnya Penataan, Penguasaan Dan Pemanfaatan Pertanahan	1. Persentase Penanganan Sengketa Tanah Garapan Yang Dilakukan Melalui Mediasi	Persen	80	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani /Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan * 100%
	2. Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Persen	70	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum / Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum * 100 %
	3. Persentase Tersedianya Tanah Objek Landreform Yang Siap Di Redistribusikan Ke Masyarakat	Persen	83	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha / Jumlah penerima tanah obyek landreform * 100%
	4. Persentase Tersedianya Tanah Untuk Masyarakat	Persen	82	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah / Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan * 100 %
	5. Persentase Tanah Aset Pemerintah Yang Bersertifikat	Persen	55	Luas Bidang tanah yang bersertifikat / Luas Bidang lahan yang seharusnya disertifikatkan*100

Selain perjanjian kinerja yang berdasarkan dari dokumen Rencana Strategis Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara, terdapat perjanjian

kinerja tambahan yang merupakan amanat dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kepada seluruh Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai berikut:

Tabel 6 : Perjanjian Kinerja Tambahan Tahun 2022

SASARAN	INDIKATOR UTAMA	SATUAN	TARGET
Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Inspektorat Daerah;	1. Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang Di Tindak Lanjuti	Jumlah	1
Melaksanakan Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP Tepat Waktu Dan Berkesesuaian;	1. Persentase Ketepatan Waktu Dan Kesesuaian Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja Setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Dan Maksimal 14 Hari Kerja Setelah Kesepakatan RAPBD Tahun 2022)	Persen	100
Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);	Persentase Ketepatan Waktu Dan Kesesuaian Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja Setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Dan Maksimal 14 Hari Kerja Setelah Kesepakatan RAPBD Tahun 2022)	Persen	100
Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	Baik (B) 60-70
Pemenuhan Ketersediaan Data Dan Informasi Pembangunan Berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah;	Persentase Keterisian Data Di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100
Membuat Inovasi Dan/Atau Diutamakan Dalam Bidang Penanggulangan Kemiskinan Sesuai Dengan Fungsi Perangkat Daerah;	Jumlah Inovasi	Jumlah	1
Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;	Capaian Output Kegiatan	Persen	100

SASARAN	INDIKATOR UTAMA	SATUAN	TARGET
Meningkatnya Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;	Persentase Capaian Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci Pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persen	100

Tabel 7
Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Untuk Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dengan Data Awal Tahun 2021 dan Target Tahun 2022

No	Indikator sasaran	Satuan	Data Awal (2021)	Target 2022	Target Akhir Renstra 2022
1	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	Persen	60,33	65	85
2	Persentase Penanganan Sengketa Tanah Garapan Yang Dilakukan Melaui Mediasi	Persen	75	80	100
3	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Persen	65	70	90
4	Persentase Tersedianya Tanah Objek Landreform Yang Siap Di Redistribusikan Ke Masyarakat	Persen	81	83	100
5	Persentase Tersedianya Tanah Untuk Masyarakat	Persen	81	82	86
6	Persentase Tanah Aset Pemerintah Yang Bersertifikat	Persen	52	55	75

2.5 Alokasi Anggaran Per Program

Anggaran belanja langsung Tahun 2022 Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab.Kutai Kartanegara yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut. :

Tabel 8 : Program dan Kegiatan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Tahun 2022

Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (RP)
Meningkatnya Perencanaan, Pem anfaatan dan Pengendalian Tata	Jumlah Rencana Detail yang telah ditetapkan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2,520,000,000.00

Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (RP)
Ruang		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1,230,000,000.00
		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	450,000,000.00
		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	780,000,000.00
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	585,000,000.00
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	585,000,000.00
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	220,000,000.00
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	160,000,000.00
		Sistem Informasi Penataan Ruang	60,000,000.00
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	485,000,000.00
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	200,000,000.00
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	65,000,000.00
		Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	135,616,000.00
		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	84,384,000.00
Meningkatnya Kelembagaan dan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Profesional di Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12,594,409,917.00
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	125,000,000.00
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	75,000,000
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50,000,000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8,195,884,919.00

Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (RP)
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,909,764,919
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	286,120,000
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	78,099,999.00
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	78,099,999
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,000,000.00
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100,000,000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	707,983,445.00
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	34,967,700
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	104,947,200
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	163,175,400
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60,000,000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	344,893,145
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	313,233,000.00
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	313,233,000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,409,121,084.00
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	207,025,600
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,202,095,484
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,665,087,470.00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	67,500,000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	350,104,000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	1,247,483,470

Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (RP)
		Kantor dan Bangunan Lainnya	
Meningkatnya Penatusahaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pertanahan	- Meningkatnya pemilikan SKPT dan persentase tanah Pemda yang bersertifikat - Persentase Penyelesaian Kasus/Sengketa Tanah Negara.	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	110,000,000.00
		Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	110,000,000.00
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	110,000,000
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	164,500,000.00
		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	164,500,000.00
		Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	114,500,000
		Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	50,000,000
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	250,000,000.00
		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	250,000,000.00

Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (RP)
		Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	250,000,000
		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	280,000,000.00
		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	200,000,000.00
		Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	100,000,000
		Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	100,000,000
		Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	80,000,000.00
		Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	80,000,000
		PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	75,000,000.00
		Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	75,000,000.00

Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (RP)
		Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	75,000,000
		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	468,000,500.00
		Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	52,670,000.00
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	52,670,000
		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	415,330,500.00
		Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	60,000,000
		Pemanfaatan Tanah Kosong	355,330,500
		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	150,000,000.00
		Penerbitan Izin Membuka Tanah	150,000,000.00
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	150,000,000
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	50,540,000.00
		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	50,540,000.00
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	50,540,000
Total			16,662,450,417.00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

3.1 Capaian Kinerja

Kerangka pengukuran capaian kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut:

a. Tingkat Realisasi Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus

$$\text{Tingkat Realisasi Positif} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$Realisasi = \frac{Target - (Target - 0)}{Target} \times 100\%$$

Saran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai	Kriteria Penilaian
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

3.2 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Rata-rata realisasi kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang tahun 2021 sebesar 91.43 %. Merujuk pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 termasuk dalam kategori peringkat kinerja Tinggi. Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteri Penilaian
Meningkatnya Pembangunan Dan Pemanfaatan Sesuai Arahkan Pola Ruang	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	Persentase	65	97	100	Sangat Tinggi
Meningkatnya Penataan, Penguasaan Dan Pemanfaatan Pertanahan	1. Persentase Penanganan Sengketa Tanah Garapan Yang Dilakukan Melaui Mediasi	Persentase	80	100	100	Sangat Tinggi
	2. Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Persentase	70	100	100	Sangat Tinggi
	3. Persentase Tersedianya Tanah Objek Landreform Yang Siap Di Redistribusikan Ke Masyarakat	Persentase	83	100	100	Sangat Tinggi
	4. Persentase Tersedianya Tanah Untuk Masyarakat	Persentase	82	100	100	Sangat Tinggi
	5. Persentase Tanah Aset Pemerintah Yang Bersertifikat		55	70	100	Sangat Tinggi
Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Inspektora t Daerah;	Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang Di Tindak Lanjuti	Jumlah	1	100	100	Sangat Tinggi
Melaksanakan Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP Tepat Waktu Dan Berkesesuaian;	Persentase Ketepatan Waktu Dan Kesesuaian Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja Setelah Penandatanganan	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi

	Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Dan Maksimal 14 Hari Kerja Setelah Kesepakatan RAPBD Tahun 2022)					
Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);	Persentase Ketepatan Waktu Dan Kesesuaian Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja Setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Dan Maksimal 14 Hari Kerja Setelah Kesepakatan RAPBD Tahun 2022)	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	Baik (B) 60-70	31.06	31.06	Rendah
Pemenuhan Ketersediaan Data Dan Informasi Pembangunan Berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah;	Persentase Keterisian Data Di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Membuat Inovasi Dan/Atau Diutamakan Dalam Bidang Penanggulangan Kemiskinan Sesuai Dengan Fungsi Perangkat Daerah;	Jumlah Inovasi	Jumlah	1	1	100	Sangat Tinggi
Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;	Capaian Output Kegiatan	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi

Meningkatnya Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;	Persentase Capaian Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci Pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
---	--	--------	-----	-----	-----	------------------

Sesuai dengan perjanjian kinerja yang diperjanjikan antara kepala Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang dengan Bupati Kutai Kartanegara, selain perjanjian kinerja yang ditetapkan berdasarkan dokumen rencana strategis, ada pula perjanjian kinerja tambahan yang harus dilaksanakan di semua perangkat daerah, Adapun analisis terhadap capaian perjanjian kinerja tersebut diuraikan dibawah ini . Adapun penjelasan capaian dari setiap indikator kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) Indikator Kinerja ke-1** “Indikator Persentase Ketaatan Terhadap RTRW Nilai capaian dari realisasi indikator persentase ketaatan terhadap RTRW di peroleh dengan membandingkan luas lahan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang sesuai pemanfaatan ruangnya dengan luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun aturan pemanfaatan ruang yang dijadikan acuan adalah rencana pola ruag Kabupaten Kutai Kartanegara yang termaktub dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 – 2033 Pada tahun 2022 target realisasi indikator persentase ketaatan terhadap RTRW adalah 65%. Sedangkan capaian dari target tersebut adalah 97%. Capaian yang diperoleh jauh melampaui target yang ditetapkan. Salah satu kondisi yang bisa menjadi penyebab adalah data penggunaan lahan eksisting yang tidak up to date sedangkan realitanya pembangunan dan perubahan guna lahan di Kabupaten Kutai Kartanegara terjadi secara masif dari waktu ke waktu. Dengan demikian data tersebut tidak dapat menggambarkan kondisi perkembangan pemanfaatan ruang terkini yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Saat ini Rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Revisi RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara sudah dalam proses penetapan menjadi peraturan daerah. Dengan ditetapkan revisi RTRW menjadi peraturan kepala daerah maka nilai

capaian indikator ketaatan terhadap RTRW akan disesuaikan dengan arahan pola ruang yang terdapat dalam revisi RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara.

2) Indikator Kinerja ke-2 Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022 yaitu Persentase Penanganan Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten Kota dengan target sebesar 80 dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100 %. Target kinerja tercapai dengan kategori sangat tinggi ini dikarenakan dari pengaduan sengketa yang masuk ke Dinas pertanahan Dan Penataan Ruang kasus sengketa tanah yang dilaporkan dapat difasilitasi dengan baik walaupun ada beberapa yang belum ditindak lanjuti disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya Pengaduan berkas tdk lengkap, Lokus kasus pengaduan yg direncanakan tergantikan dengan pengaduan yg urgent dan mendesak, kelengkapan kerja kurang seperti alat ukur ketelitian tinggi dan SDM tenaga teknis Dinas pertanahan dan penataan Ruang yang kurang dan kurangnya waktu penyelesaian. Namun target kinerja tercapai hal ini menggambarkan bahwa kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang sebagai Fasilitator dalam Penanganan Sengketa Tanah Garapan Yang Dilakukan Melalui Mediasi sudah berjalan dengan baik.

3) Indikator Kinerja ke-3 , yaitu Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum 70 dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100 %. Target kinerja tercapai dengan kategori sangat tinggi banyak faktor yang mempengaruhi berhasilnya indikator ini antara lain sudah tersedianya dokumen perencanaan yaitu Pengadaan Lahan Pasar Kecamatan kembang Janggut, Pengadaan Tanah Untuk TPU Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong dan Pengadaan Tanah Untuk Perluasan SDN 020 Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak 2. Jumlah pemilik lahan yg akan diganti kerugian tidak lebih 2 orang. 3. Mendapat dukungan dari masyarakat dan aparat Pemerintah/OPD (Desa dan Kecamatan) yg memerlukan tanah. Namun terdapat juga factor penghambat dari indikator ini antara lain Anggaran Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang untuk Kegiatan Pengadaan Tanah terlalu rendah dikhawatirkan untuk kelanjutan Kegiatan Belanja Pengadaan Tanah

ditahun berikutnya tidak bisa dijalankan karena batas waktu dimana untuk dokumen perencanaan maksimal 2 tahun.

4) **Indikator Kinerja ke-4** , Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022 yaitu Persentase Tersedianya Tanah Objek Landreform Yang Siap Di Redistribusikan Ke Masyarakat,.Target kinerja tercapai 100% dikarenakan terealisasinya penerima tanah obyek landreform sebesar 85 bidang di desa Jonggon jaya Kecamatan Loa Kulu kabupaten Kutai Kartanegara.

5) **Indikator Kinerja ke-5** , Persentase Tersedianya Tanah Untuk Masyarakat Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022 sebesar 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100 % . Target kinerja tercapai karena adanya dukungan dari pihak kecamatan dengan memberikan data yang sudah tersedia dimana dari Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah dengan Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan tercapai 100%.Namun masih ada kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu ada beberapa data yang belum valid, data belum dapat terisi dengan lengkap dikarenakan pengisian nomor surat / register kecamatan berdasarkan nomor urut dibuku tanah.

6) **Indikator Kinerja ke-6**

Target kinerja “Indikator Kinerja ke-5” tahun 2022 Persentase Tanah Aset Pemerintah Yang Bersertifikat sebesar 55% dan terrealisasi 70 % atau capaian kinerja sebesar 127 %. Target kinerja tercapai dengan kriteria Tinggi, Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu 1. Lokasi Berada di lahan Transmigrasi. 2. Dalam daftar Aset lokasi ada, tapi dilapangan tidak ditemukan. 3. Persyaratan permohonan pendaftaran di BPN yang berubah-ubah.

4. Tidak ditemukan surat Tanah asli, akan tetapi yang ada hanya Foto Copy/Salinan. 5. Proses tim penelitian tanah Oleh BPN yang terlalu lama, serta banyaknya persyaratan yang diminta. 6. Saksi batas tidak domisili didekat tanah aset Pemerintah Daerah. 7. Banyak Lokasi yang belum tercatat namun juga ada factor pendukung terhadap capaian indicator ini yaitu 1. Dokumen

Pengadaan / Surat surat Tanah ada. 2. Patok Batas ada. 3. Objeknya (Tanahnya) Jelas. 4. Tanah Tercatat dalam KIB. 5. Objeknya (Tanahnya) Tidak ada Sengketa. 6. Terdapat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 7. SK Patok / Surat Menunjukkan Aset tanah ada. Adapun analisis terhadap capaian perjanjian kinerja tambahan Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang diuraikan dibawah ini :

- 7) **Target kinerja indikator ke-7, Temuan Administrasi BPK/Inspektorat yang di Tindak Lanjuti**, Tindak Lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh masing-masing perangkat Daerah. Total jumlah temuan Di tahun 2022 Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu 1 temuan yang ditindak lanjuti untuk memenuhi kewajiban seperti yang dituangkan dalam rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dengan tindak lanjut yaitu melakukan proses koordinasi melalui surat usulan untuk difasilitasi dengan OPD teknis yang berkaitan dengan temuan permasalahan tersebut , dan proses masih menunggu jadwal dan undangan dari Assisten bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat.
- 8) **Target kinerja indikator ke-8, Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset Dalam Penelusuran** terealisasi sebesar 100%, hasil ini diperoleh dari Berita Acara hasil rekonsiliasi aset tetap, kertas kerja rekonsiliasi dan daftar inventaris barang yang memuat seluruh barang milik daerah yang dilakukan penelusuran sudah teridentifikasi semua dan tercatat lengkap dalam aplikasi SIMDA BMD. Atas hasil tersebut capaian kinerja yang diperoleh sebesar 100%, sehingga target kinerja tercapai dengan kriteria penilaian sangat Tinggi
- 9) **Target kinerja indikator ke-9** tahun 2022 yaitu sebesar 1 bidang tanah yang mendapat pengamanan. Dari target tersebut, semua aset tanah yang ada Dinas Pertanahan dan penataan ruang sudah tercatat dalam SIMDA BMD (KIB A) namun masih terdapat kendala yaitu kurangnya data dan informasi terkait pengamanan bidang tanah yaitu berupa sertifikat Hak Pakai asli. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang menindak lanjuti dengan melakukan koordinasi dengan pihak DJKN/KPKNL Provinsi Kalimantan Timur di

samarinda untuk mencari informasi keberadaan sertifikat Hak Pakai asli atas nama pemegang hak yaitu Kantor Departemen Penerangan No.009 tanggal 29 januari 1983 yang telah di hibahkan ke kantor Dinas Pertanahan Dan Penataan, dan proses masih menunggu informasi dari pihak DJKN/KPKNL Provinsi Kalimantan Timur.

10) Target kinerja indikator ke-10, Persentase Ketepatan Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP. Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara telah melaksanakan proses seluruh rencana umum pengadaan pada aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) pada tahun 2022 dalam komitmen atas kebijakan pengadaan barang/jasa (PBJ). Persentase capaian melalui system informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sudah dilakukan sebesar 100%.

11) Target kinerja indikator ke-11, Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN dan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022. Dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi Dinas Pertanahan Dan Penataan ruang Kabupaten Kutai Kartanegara menerapkan pedoman kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dalam rangka pengendalian terjadinya kecurangan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Persentase capaian Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penginputan LHKPN dan LHKASN berjalan dengan baik sehingga inputan berjalan sebesar 100% sebelum tenggat waktu berakhir. berdasarkan hasil monitoring dari 6 pejabat struktural dan 15 pejabat Fungsional Ahli muda yang wajib lapor semuanya sudah mengisi LHKPN di website <https://elhkpn.kpk.go.id> sebelum tanggal 31 maret 2022.

Untuk indikator ke-3 diperoleh realisasi sebesar 100%. Sedangkan berdasarkan hasil monitoring pengisian LHKASN di website <https://siharka.menpan.go.id> sebelum tanggal 31 maret 2022 semua ASN Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang sudah melaksanakan kewajiban sehingga diperoleh realisasi capaian target sebesar 100% dengan kriteria penilaian sangat tinggi.

12) Target kinerja indikator ke-12, Predikat Tata kelola Arsip Perangkat Daerah.

Dalam rangka penerapan Peraturan Menpan-RB Nomor 30 Tahun 2018 bahwa

kualitas pengelolaan arsip menjadi indikator penilaian pelaksanaan Repormasi Birokrasi. Berdasarkan penilaian monitoring tindak lanjut hasil pengawasan internal kearsipan Dinas Pertanahan Dan penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 memperoleh Nilai 31,06 dengan kategori C dari hasil audit tersebut Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Komitmen untuk berusaha terus melaksanakan perbaikan pengelolaan arsip agar indikator kinerja pengelolaan arsip dapat tercapai.

13) Target kinerja indikator ke-13, Membuat Inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang sudah membuat 2 inovasi yaitu penguatan hak atas tanah lahan pertanian masyarakat dan administrasi Izin Membuka Tanah Negara (IMTN/SKPT).

14). Target kinerja indikator ke-14, Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang pada tahun 2022 yaitu Persentase ketersediaan data di aplikasi satu data Kukar dengan target sebesar 100%. Dari hasil tersebut target indikator terealisasi sesuai target sehingga capaian kinerja diperoleh sebesar 100% dengan kriteria penilaian sangat tinggi.

15). Target kinerja indikator ke-15, Indikator kinerja ke-7 yaitu Terealisasinya output kegiatan tanpa menimbulkan potensi utang dengan target pada tahun 2022 yaitu sebesar 100%. merupakan indikator yang menyatakan bahwa seluruh kegiatan telah terealisasi 100% sehingga tidak terjadi hutang sesuai dengan target kinerja dan capaian target 100% berhasil.

16). Target kinerja indikator ke-16, Persentase Capaian Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci Pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan indikator yang menyatakan bahwa seluruh Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pertanahan pada Laporan Penyusunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Pertanahan dan Penataan ruang telah terealisasi 100% sehingga sesuai dengan target kinerja dan capaian target 100%. Namun terdapat juga faktor penghambat dari indikator ini antara lain Data

yang dibutuhkan untuk pelaporan IKK terhambat dikarenakan data diperoleh dari instansi lain seperti ATR/BPN, DPMPSTP dan Kecamatan.

**a. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan RealisasiKinerja
Sebelumnya**

Realisasi kinerja Persentase Ketaatan Terhadap RTRW tahun 2022 sebesar 100 %. Sedangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya tahun 2021 sebesar 100 %. Pada tahun 2022 target realisasi indikator persentase ketaatan terhadap RTRW adalah 65%. Sedangkan capaian dari target tersebut adalah 97%. Capaian yang diperoleh jauh melampaui target yang ditetapkan. pencapaian sasaran program ini selain karena Komitmen Pimpinan juga peran serta semua stakeholder dilingkup Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang juga didukung dengan adanya Supervisi dan Pendampingan dari Kementerian ATR Serta sudah dilaksanakannya Revisi Peraturan Daerah tentang RTRW yang saat ini sudah dalam proses penetapan menjadi peraturan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya secara rinci tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.3
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Realisasi
KinerjaSebelumnya**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realsiasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	
Meningkatnya Pembangunan Dan Pemanfaatan Sesuai Arahan Pola Ruang	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	Perse ntase	60,33	60,33	100%	65,00	97	100 %	Meningkat
	1. Persentase Penanganan Sengketa Tanah Garapan Yang Dilakukan Melalui Mediasi	Perse ntase	75	100 %	100 %	80 %	100 %	100 %	Meningkat

Meningkatnya Penataan, Penguasaan Dan Pemanfaatan Pertanahan	2. Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Persentase	65	100 %	100 %	70 %	100 %	100 %	Meningkat
	3. Persentase Tersedianya Tanah Objek Landreform Yang Siap Di Redistribusikan Ke Masyarakat	Persentase	81	100 %	100 %	83 %	100 %	100 %	Meningkat
	4. Persentase Tersedianya Tanah Untuk Masyarakat	Persentase	81	100 %	100 %	82 %	100 %	100 %	Meningkat
	5. Persentase Tanah Aset Pemerintah Yang Bersertifikat	Persentase	52	100 %	100 %	55%	70%	100 %	Meningkat

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

<i>Indikator Kinerja</i>	Target Sasaran Akhir Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2022	Persentase Realisasi TargetSasaran RenstraSampai Tahun 2022
1.Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	85	97	100
2. Persentase Penanganan Sengketa Tanah Garapan Yang Dilakukan Melalui Mediasi	100	100	100

3. Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	90	100	111
4. Persentase Tersedianya Tanah Objek Landreform Yang Siap Di Redistribusikan Ke Masyarakat	100	100	100
5. Persentase Tersedianya Tanah Untuk Masyarakat	86	100	100
6. Persentase Tanah Aset Pemerintah Yang Bersertifikat	75	70	93,34

c. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung apabila target kinerja tercapai 100% atau lebih. Penghitungannya dengan cara mengurangkan persentase capaian kinerja dengan persentase penggunaan anggaran. Adapun rincian efisiensi penggunaan sumber daya pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaran	Program	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi (%)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3-5)	(7)
Meningkatnya Penataan, Penguasaan Dan Pemanfaatan Pertanahan						Efisiensi
	2. Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	100	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	94,0	6	
	3. Persentase Tersedianya Tanah Objek Landreform Yang Siap Di Redistribusikan Ke Masyarakat	100	Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	71	29	
	4. Persentase Tersedianya Tanah Untuk Masyarakat	100	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	98,2	1,8	

Berdasarkan hasil tabel. diatas dapat dilihat bahwa penggunaan anggaran terhadap realisasi capaian kinerja sasaran (indikator Kinerja Utama) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang sudah melakukan efisiensi anggaran dengan rata-rata efisiensi anggaran sebesar 12,27% dan efektifitas pencapaian kinerja dengan rata-rata sebesar **100%** hal ini berarti bahwa Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan program dan kegiatan telah melakukan manajemen

Sumber daya anggaran (keuangan) dengan handal sehingga potensi pemborosan anggaran dapat dihindari.

d. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran kinerja strategis didukung oleh seluruh program dan kegiatan pendukungnya dalam memenuhi indikator kinerja program dan target kegiatan. Keberhasilan dapat tercapai karena adanya semangat kerja, komitmen, SDM yang berkompetain, anggaran yang memadai, perencanaan kerja yang efektif, prosedur kerja dan sarana prasarana yang cukup dan juga ditunjang Pencapaian realisasi target kinerja program dan kegiatan yang relevan. Adapun capaian kinerja program Pertanahan dan Penataan Ruang yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Indikator kinerja Program Penyelenggaraan Penataan Ruang tahun 2022 yaitu Persentase Ketaatan Terhadap RTRW dengan persentase sebesar 100 %, berhasilnya pencapaian sasaran program ini selain karena Komitmen Pimpinan juga peran serta semua stakeholder dilingkup Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang juga didukung dengan adanya Supervisi dan Pendampingan dari Kementerian ATR serta sudah dilaksanakannya Revisi Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara, tingginya animo Masyarakat terkait pengurusan kegiatan pemanfaatan ruang dan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (PPKPR) dan Sudah ada 6 (Enam) RDTR yang sudah proses penyusunan, selebihnya masih dalam proses penyusunan. Akan tetapi masih terdapat kendala dalam pencapain indikator ini seperti adanya 1. Revisi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW belum dijadikan Peraturan Daerah, sementara pemanfaat ruang yang cukup tinggi. 2. Proses penyusunan RDTR dimana baru 6 RDTR yang masuk dalam persetujuan Substansi, dan selebihnya masih dalam proses materi teknis. 3. Kurangnya sosialisasi Peraturan Daerah Tentang RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara. Meskipun mempunyai banyak faktor kendala dari indikator ini namun pada tahun 2022 semua target dapat diselesaikan.

2) Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota Indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota tahun 2022 yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target sebesar 74% dan realisasinya yaitu 76,90 atau capaian kinerja sebesar 100 %. Keberhasilan pencapaian sasaran program ini selain karena Komitmen Pimpinan dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi Aparatur Sipil Negara dan

Non Aparatur Sipil Negara dilingkup Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang. Tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan disebabkan karena kegiatan yang sifatnya dan pelaksanaannya rutin dapat terlaksana dengan baik serta pelaporan capaian kinerja dan Keuangan yang disajikan selalu tepat waktu dengan akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan Hasil Evaluasi Atas SAKIP Tahun Sebelumnya

No	Komponen Yang di Nilai	Bobot	Nilai 2020	Nilai 2021	Keterangan
1.	Perencanaan Kinerja	30%	26,83	26,13	-
2.	Pengukuran Kinerja	25%	13,75	15,63	Meningkat
3.	Pelaporan Kinerja	15%	12,85	11,33	-
4.	Evaluasi Kinerja	10%	5,50	7,43	Meningkat
5.	Capaian Kinerja	20%	14,38	16,38	Meningkat
	Nilai Hasil Evaluasi	100%	73,29	76,90	Meningkat
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB	Meningkat

Berdasarkan hasil Laporan Hasil Evaluasi yang di keluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang kabupaten Kutai Kartanegara mengalami peningkatan yang signifikan .

- 3) Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee dengan target sebesar 70% dan realisasinya atau capaian kinerja sebesar 100 %. Berhasilnya pencapaian program ini karena komitmen pimpinan dan kerja keras serta peran semua stakeholder di lingkungan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang serta dukungan dari aparatur kecamatan dan desa dan di . Kendala yang dihadapi sampai saat ini tidak adanya data dan informasi mengenai subjek dan objek di tingkat Kecamatan dan Desa. Ini merupakan tantangan ke depan untuk mewujudkan program Redistribusi Tanah.
- 4) Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan dengan target sebesar 70% dan realisasinya atau capaian kinerja sebesar 100 %. Berhasilnya pencapaian sasaran program ini selain karena Komitmen Pimpinan juga peran serta semua stakeholder dilingkup Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang juga didukung adanya dukungan dari masyarakat dan aparat Pemerintah/OPD (Desa dan Kecamatan) yg memerlukan tanah. Kendala yang mempengaruhi capaian indikator

yaitu Tidak updatenya NJOP(Nilai Jual Objek Pajak) dan nilai pasar yang tinggi, belum ada Koordinasi antara OPD yang memerlukan tanah dan OPD yang membidangi urusan terkait pengadaan tanah yang diajukan dalam proposal serta kurangnya informasi terkait kondisi, risalah dan status kepemilikan tanah pada prososal yang diterima.

- 5) Program Penatagunaan Tanah target sebesar 76% dan realisasinya atau capaian kinerja sebesar 100 %. Keberhasilan capaian ini karena didukung dengan tersedianya Tenaga Teknis dan tersedianya Peralatan dan Perangkat yang memadai
- 6) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, target sebesar 80% dan realisasinya atau capaian kinerja sebesar 100 %. berhasilnya pencapaian sasaran program ini selain karena Komitmen Pimpinan juga peran serta semua stakeholder Baik itu ASN maupun SDM THL dilingkup Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, juga didukung dengan adanya regulasi sebagai standar penanganan sengketa.
- 7) Program Pengelolaan Tanah Kosong, meningkatnya persentase tanah Pemda yang bersertifikat capaian kinerja sebesar 55% tercapai 70% dengan kriteria Tinggi, keberhasilan mencapai hasil 100 % Keberhasilan pencapaian sasaran program ini selain karena Komitmen Pimpinan juga peran serta semua stakeholder dilingkup Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang juga didukung dengan ketersediaan anggaran yang cukup, peran aktif pihak Desa/Kelurahan dan OPD pemohon sertifikat aset Pemda dan dari pihak BPN yang welcome atas pelaksanaan kegiatan ini. namun masih ada kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja seperti :
 1. Rencana tidak sesuai dengan kondisi Lapangan contohnya banyaknya surat tanah asli yang tidak diketemukan sehingga diperlukan surat keterangan dari pihak yang mengeluarkan surat tersebut (Kelurahan/Desa).
 2. Lokasi pelaksanaan berbeda dengan rencana, Sebagian besar lokasi tanah asset Pemda berada didalam HPL Transmigrasi sehingga diperlukan Rekomendasi Dari Dinas terkait
 3. Pada saat pengukuran ada perbedaan luas antara surat tanah dengan kondisi fisik dilapangan,sehingga diperlukan surat pernyataan beda luas yang ditertibkan oleh pihak BPN Kabupaten Kutai Kartanegara.
 4. Adanya Perubahan regulasi dari BPN sehingga diperlukan perubahan Blanko permohonan karena membutuhkan waktu dalam penandatanganan saksi batas pada blanko permohonan

5. Lamanya proses penerbitan peta bidang tanah dan SK pemberian hak di BPN.
- 8) Program Pengelolaan Izin Lokasi, dengan target 15% terealisasi sebesar 15% atau capaian indikator 100% keberhasilan program ini didukung oleh ketersediaan data SK Ijin Lokasi dan ketersediaan data permohonan dari Kepala Desa terkait identifikasi pemanfaatan lahan masyarakat di dalam HGU. Sedangkan kendala yang dihadapi yaitu pengambilan data lapangan baik secara fisik dan melalui drone bergantung cuaca saat pengambilan - ketersediaan mobil lapangan yang terbatas menjadi kendala, karena ke lokasi diperlukan kendaraan double, sedangkan di Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang hanya tersedia 1 kendaraan digunakan melayani 4 bidang sehingga waktu pelaksanaan kegiatan di lapangan bertambah karena berulang pelaksanaan ke lokasi, hal ini menyebabkan ketidak efektifan hasil data yang diperoleh dengan keterbatasan waktu pelaksanaan sesuai anggaran - kekurangan data hasil identifikasi akan diambil kembali tahun 2023
- 9) Program Penetapan Tanah Ulayat dengan target sebesar 15% dan realisasinya 15% capaian kinerja sebesar 100 %. Factor pendukung tercapainya program ini yaitu dengan Keberadaan kearifan lokal dan situs-situs budaya hasil Identifikasi keberadaan situs-situs budaya yang terdapat di Kecamatan Anggana, Kecamatan Muara Kaman dan Kecamatan Sang-Sanga namun terkendala dengan Regulasi di Daerah untuk mengatur tanah ulayat Tanah Ulayat atau Tanah Adat sebagaimana kriteria di dalam Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tidak ada yg sesuai di Kutai Kartanegara sehingga belum ada kejelasan kewenangan perlindungan situs-situs tersebut maka dipandang perlu rapat koordinasi melibatkan stakeholder terkait agar ada kejelasan untuk dilakukan upaya perlindungan lahan situs-situs tersebut agar bisa terlindungi.
- 10) Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah dengan target sebesar 82% dan realisasinya 100% capaian kinerja sebesar 100 %. Factor pendukung tercapainya program ini yaitu 1.Sudah tersedianya beberapa data disetiap kecamatan. 2.Adanya dukungan dari pihak kecamatan dengan memberikan data yang diminta dan kendala yang mempengaruhi keberhasilan yaitu 1. Ada beberapa data yang belum valid, belum dapat terisi dengan lengkap. 2. Pengisian nomor

surat / register kecamatan berdasarkan nomor urut dibuku tanah.

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Program Penunjang Keberhasilan ataupun
Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Penunjang	Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Persentase Realisasi Kinerja Program	Analisis Keberhasilan / Kegagalan
Meningkatnya Pembangunan Dan Pemanfaatan Sesuai Arah Pola Ruang	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	Persentase	65	97	100	berhasil
Meningkatnya Penataan, Penguasaan Dan Pemanfaatan Pertanahan	1. Persentase Penanganan Sengketa Tanah Garapan Yang Dilakukan Melalui Mediasi	Persentase	80	100	100	berhasil
	2. Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Persentase	70	100	100	berhasil
	3. Persentase Tersedianya Tanah Objek Landreform Yang Siap Di Redistribusikan Ke Masyarakat	Persentase	83	100	100	berhasil
	4. Persentase Tersedianya Tanah	Persentase	82	100	100	berhasil

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Penunjang	Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Persentase Realisasi Kinerja Program	Analisis Keberhasilan / Kegagalan
	Untuk Masyarakat					
	5.Persentase Tanah Aset Pemerintah Yang Bersertifikat	Persentase	55	70	100	berhasil

3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2022

Realisasi anggaran program/kegiatan Tahun Anggaran 2022 dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 91,43%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. 7
Realisasi Anggaran Program dan KegiatanTahun 2022

Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran
Meningkatnya Perencanaan, Pem anfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	Jumlah Rencana Detail yang telah ditetapkan	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENATAAN RUANG	2,520,000,000.00	2,301,297,655.00	91.32	283,086,345.00
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1,230,000,000.00	1,196,400,027.00	97.27	33,599,973.00
		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	450,000,000.00	416,538,929	92.56	33,461,071
		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	780,000,000.00	779,861,098	99.98	138,902

Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (RP)	Realisasi (Rp)	Presentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	585,000,000.00	577,575,265.00	98.73	7,424,735.00
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	585,000,000.00	577,575,265	98.73	7,424,735
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	220,000,000.00	172,002,000.00	78.18	47,998,000.00
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	160,000,000.00	139,757,000	87.35	20,243,000
		Sistem Informasi Penataan Ruang	60,000,000.00	32,245,000	53.74	27,755,000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	485,000,000.00	355,320,363.00	73.26	194,063,637.00
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	200,000,000.00	152,399,363	76.20	47,600,637
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	65,000,000.00	59,309,000	91.24	5,691,000
		Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	135,616,000.00	95,154,000	70.16	104,846,000
		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	84,384,000.00	48,458,000	57.43	35,926,000
Meningkatnya Kelembagaan dan Terwujudnya Tata Kelola	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	12,594,409,917.00	11,712,408,036.00	93	882,001,881.00

Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (RP)	Realisasi (Rp)	Presentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran
Pemerintahan yang Baik dan Profesional di Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		KABUPATEN/KOTA				
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	125,000,000.00	124,447,400.00	99.56	552,600.00
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	75,000,000	74,498,000	99.33	502,000
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50,000,000	49,949,400	99.90	50,600
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8,195,884,919.00	7,536,984,940.00	91.96	658,899,979.00
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,909,764,919	7,314,004,940	92.47	595,759,979
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	286,120,000	222,980,000	77.93	63,140,000
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	78,099,999.00	78,076,000.00	99.97	23,999.00
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	78,099,999	78,076,000	99.97	23,999
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,000,000.00	99,977,500.00	99.98	22,500.00
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100,000,000	99,977,500	99.98	22,500
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	707,983,445.00	656,159,124.00	92.68	51,824,321.00
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	34,967,700	34,776,350	99.45	191,350
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	104,947,200	104,831,000	99.89	116,200
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	163,175,400	161,466,120	98.95	1,709,280

Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (RP)	Realisasi (Rp)	Presentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60,000,000	59,756,050	99.59	243,950
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	344,893,145	295,329,604	85.63	49,563,541
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	-
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	313,233,000.00	299,971,950.00	95.77	13,261,050.00
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	313,233,000	299,971,950	95.77	13,261,050
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,409,121,084.00	1,360,087,066.00	96.52	49,034,018.00
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	207,025,600	186,794,620	90.23	20,230,980
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,202,095,484	1,173,292,446	97.60	28,803,038
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,665,087,470.00	1,556,704,056.00	93.49	108,383,414.00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	67,500,000	33,451,850	49.56	34,048,150
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	350,104,000	279,697,820	79.89	70,406,180
		Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,247,483,470	1,243,554,386	99.69	3,929,084

Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (RP)	Realisasi (Rp)	Presentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran
Meningkatnya Penatusahaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pertanahan	Meningkat nya pemilikan SKPT dan persentase tanah Pemda yang bersertifikat - Persentase Penyelesaian Kasus/Sengketa Tanah Negara.	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	110,000,000.00	66,360,000.00	60.33	43,640,000.00
		Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	110,000,000.00	66,360,000.00	60.33	43,640,000.00
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	110,000,000	66,360,000	60.33	43,640,000
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	164,500,000.00	163,892,500.00	99.63	607,500.00
		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	164,500,000.00	163,892,500.00	99.63	607,500.00
		Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	114,500,000	114,098,500	99.65	401,500
		Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	50,000,000	49,794,000	99.59	206,000
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	250,000,000.00	234,948,000.00	93.98	15,052,000.00

Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (RP)	Realisasi (Rp)	Presentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran
		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	250,000,000.00	234,948,000.00	93.98	15,052,000.00
		Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	250,000,000	234,948,000	93.98	15,052,000
		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	280,000,000.00	198,280,000.00	70.81	81,720,000.00
		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	200,000,000.00	120,925,000.00	60.46	79,075,000.00
		Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	100,000,000	91,905,000	91.91	8,095,000
		Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	100,000,000	29,020,000	29.02	70,980,000
		Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	80,000,000.00	77,355,000.00	96.69	2,645,000.00

Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (RP)	Realisasi (Rp)	Presentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran
		Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	80,000,000	77,355,000	96.69	2,645,000
		PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	75,000,000.00	61,020,000.00	81.36	13,980,000.00
		Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	75,000,000.00	61,020,000.00	81.36	13,980,000.00
		Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	75,000,000	61,020,000	81.36	13,980,000
		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	468,000,500.00	311,435,343.00	66.55	156,565,157.00
		Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	52,670,000.00	38,595,000.00	73.28	14,075,000.00
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	52,670,000	38,595,000	73.28	14,075,000
		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	415,330,500.00	272,840,343.00	65.69	142,490,157.00
		Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	60,000,000	36,610,000	61.02	23,390,000
		Pemanfaatan Tanah Kosong	355,330,500	236,230,343	66.48	119,100,157
		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	150,000,000.00	147,245,000.00	98.16	2,755,000.00
		Penerbitan Izin Membuka Tanah	150,000,000.00	147,245,000.00	98.16	2,755,000.00
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	150,000,000	147,245,000	98.16	2,755,000
		PROGRAM PENATAGUNAA N TANAH	50,540,000.00	37,570,000.00	74.34	12,970,000.00

Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (RP)	Realisasi (Rp)	Presentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran
		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	50,540,000.00	37,570,000.00	74.34	12,970,000.00
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	50,540,000	37,570,000	74.34	12,970,000
Total			16,662,450,417.00	15,234,456,534.00	91.43	1,492,377,883.00

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun Sebelumnya (2021)

Sedangkan pada tahun sebelumnya (2021) realisasi angggaran sebesar 85,98%, dengan rincian sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (RP)	Realisasi (Rp)	Presentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran
Meningkatnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	Jumlah Rencana Detail yang telah ditetapkan menjadi Rancangan Peraturan Daerah	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENATAAN RUANG	2,804,811,200.00	1,785,722,827.00	63.67	1,019,088,373.00
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1,500,000,000.00	964,637,187.00	64.31	535,362,813.00
		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	900,000,000	667,927,687	74.21	232,072,313
		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	600,000,000	296,709,500	49.45	303,290,500
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	650,000,000.00	225,922,240.00	34.76	424,077,760.00

Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (RP)	Realisasi (Rp)	Presentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	650,000,000	225,922,240	34.76	424,077,760
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	654,811,200.00	595,163,400.00	90.89	59,647,800.00
		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	654,811,200	595,163,400	90.89	59,647,800
Meningkatnya Kelembagaan dan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Profesional di Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12,612,218,056.00	11,563,070,531.00	91.68	1,049,147,525.00
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	113,205,200.00	70,750,600.00	62.50	42,454,600.00
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	70,253,200	38,528,100	54.84	31,725,100
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42,952,000	32,222,500	75.02	10,729,500
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8,253,432,145.00	7,769,781,179.00	94.14	483,650,966.00
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,885,052,145	7,452,571,179	94.52	432,480,966
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	166,090,000	166,090,000	100.00	-
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	202,290,000	151,120,000	74.70	51,170,000
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	55,220,000.00	54,756,000.00	99.16	464,000.00

Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (RP)	Realisasi (Rp)	Presentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	55,220,000	54,756,000	99.16	464,000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	696,365,400.00	482,114,820.00	69.23	214,250,580.00
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	-
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100,159,500	99,145,140	98.99	1,014,360
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	132,220,000	128,552,200	97.23	3,667,800
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	52,852,900	52,687,300	99.69	165,600
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	14,610,000	13,380,000	91.58	1,230,000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	298,079,000	92,929,180	31.18	205,149,820
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	98,444,000	95,421,000	96.93	3,023,000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	592,657,820.00	591,087,800.00	99.74	1,570,020.00
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	592,657,820	591,087,800	99.74	1,570,020
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,416,648,864.00	1,284,040,680.00	90.64	132,608,184.00
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	213,343,380	170,790,073	80.05	42,553,307
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	1,203,305,484	1,113,250,607	92.52	90,054,877

Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (RP)	Realisasi (Rp)	Presentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran
		Kantor				
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,484,688,627.00	1,310,539,452.00	88.27	174,149,175.00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	67,500,000	18,610,276	27.57	48,889,724
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	240,832,000	120,322,025	49.96	120,509,975
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,176,356,627	1,171,607,151	99.60	4,749,476
Meningkatnya Penatusahaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pertanahan	- Meningkat nya pemilikan SKPT dan persentase tanah Pemda yang bersertifikat - Persentase Penyelesaian Kasus/Sengketa Tanah Negara	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	149,999,800.00	126,977,000.00	84.65	23,022,800.00
		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	149,999,800.00	126,977,000.00	84.65	23,022,800.00
		Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	149,999,800.00	126,977,000.00	84.65	23,022,800

Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (RP)	Realisasi (Rp)	Presentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran
		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	349,999,900.00	244,738,900.00	69.93	105,261,000.00
		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	349,999,900.00	244,738,900.00	69.93	105,261,000.00
		Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	150,000,000.00	96,795,000.00	64.53	53,205,000
		Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	199,999,900.00	147,943,900.00	73.97	52,056,000
		PROGRAM PENATAGUNAA N TANAH	377,274,600.00	271,478,320.00	71.96	105,796,280.00
		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	377,274,600.00	271,478,320.00	71.96	105,796,280.00
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	377,274,600.00	271,478,320.00	71.96	105,796,280
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	150,390,258.00	146,550,319.00	97.45	3,839,939.00

Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (RP)	Realisasi (Rp)	Presentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran
		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	150,390,258.00	146,550,319.00	97.45	3,839,939.00
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	150,390,258.00	146,550,319.00	97.45	3,839,939
Total			16,444,693,814.00	14,138,537,897.00	85.98	2,306,155,917.00

Dengan demikian, pada tahun 2022 terjadi peningkatan realisasi anggaran sebesar 91,43,8%. Dibandingkan dengan tahun 2021 dengan realisasi anggaran sebesar 85,98%. Atau mengalami kenaikan capaian kinerja sebesar 5,5%.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022, merupakan instrumen dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. LKjIP Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan dan kinerja sasaran .

Secara umum capaian kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2022 rata-rata sebesar 81,42% (Tinggi) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Capaian kinerja Meningkatnya Penataan, Penguasaan Dan Pemanfaatan Pertanahan sebesar 100 % (Sangat Tinggi).
- 2) Capaian kinerja Meningkatnya Pembangunan Dan Pemanfaatan Sesuai Arahana Pola Ruang sebesar 100 % (Sangat Tinggi).

Capaian kinerja tahun 2022 meningkat dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2021 capaian kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang sebesar 83,99% atau terjadi peningkatan kinerja sebesar 5%

4.2 Perbaikan Kedepan

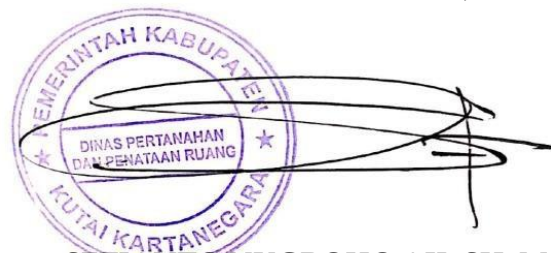
Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor penghambat dan pendukung capaian kinerja tahun 2022, maka rencana perbaikan kedepan adalah sebagai berikut :

- 1) Mengoptimalkan proses penyusunan perencanaan dan evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan secara rutin dan konsisten yaitu dengan menerapkan E-Pantau dan Menerapkan Sistem Informasi Perangkat Daerah(SIPD) untuk Memperbaiki sistem Kinerja;
- 2) Meningkatkan Koordinasi,komunikasi dan Pengawasan Internal serta eksternal terhadap semua program kegiatan dan sub Kegiatan;
- 3) menerapkan dan memaksimalkan tim satuan tugas (Satgas) SPIP PD dalam mewujudkan penerapan SPIP di semua lini;

- 4) Meningkatkan kualitas SDM Aparatur melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan, salah satunya dengan melakukan kerjasama melalui MOU antara STPN (Sekolah Tinggi Pertanahan Negara) Yogyakarta dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022.
- 5) Meningkatkan kebutuhan Sarana dan Prasarana yang memadai.

Tanggapan, Saran dan masukan dari Perangkat Daerah penerima hasil rekomendasi sangat diharapkan sebagai masukan dan akan dijadikan sebagai umpan balik demi perbaikan pelaksanaan kedepan. Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2022, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja selanjutnya.

Kutai Kartanegara, Februari 2023
KEPALA DINAS PERTANAHAN DAN
PENATAAN RUANG,

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Kutai Kartanegara government. The outer ring of the stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA'. The inner part of the stamp contains the text 'DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

SETIANTO NUGROHO AJI, SH.,M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671027 199403 1 008